

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

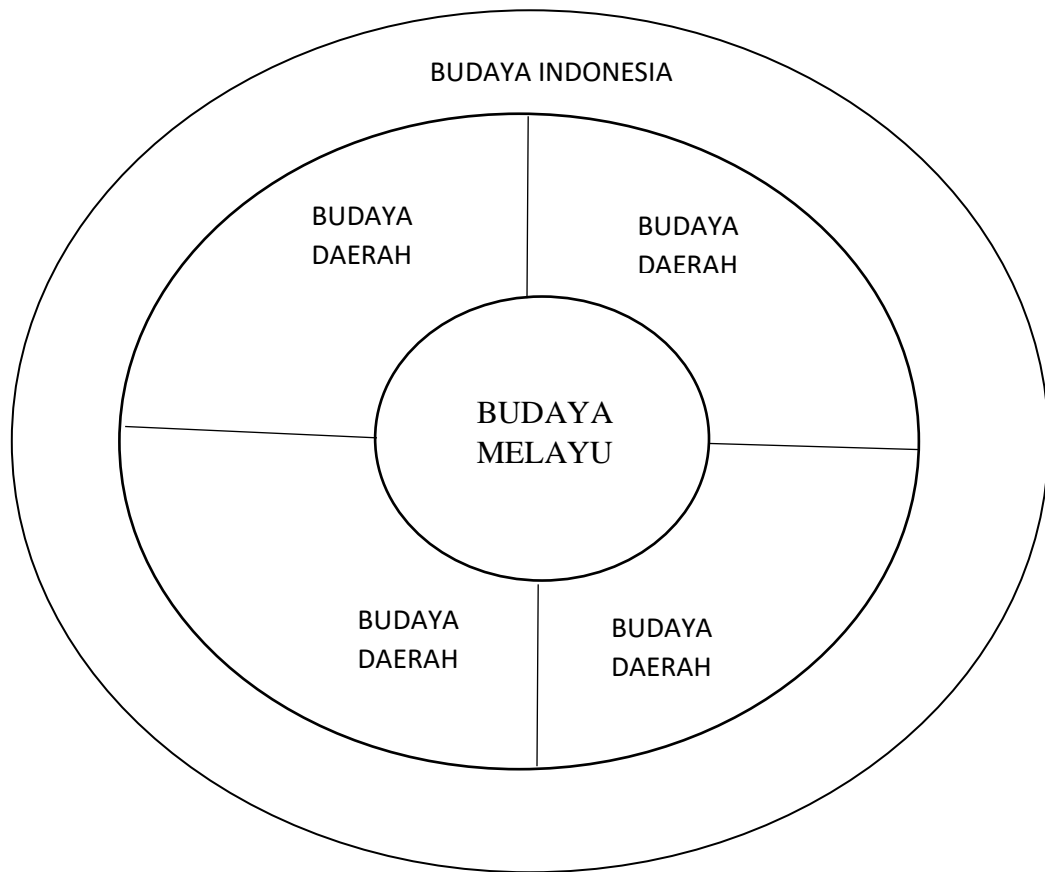
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai ragam kebudayaan, baik kebudayaan internasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kondisi Indonesia yang menjelaskan bahwa adat melayu riau merupakan seperangkat nilai merupakan sebagai negara kepulauan, dan memiliki berbagai suku bangsa serta pola pikir yang beragam, seni, agama, pengetahuan, bahasa, memiliki ciri khas kebudayaan lokal yang berbeda-beda dengan karakteristik yang unik.

Dalam Perda No 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa Adat Melayu merupakan kekayaan daerah tidak berwujud (intangible) yang tak ternilai sehingga perlu di lestarikan, di kembangkan, dan di lindungi dengan Peraturan Daerah. Proses globalisasi dapat mengakibatkan pergeseran tata nilai adat dan budaya, tidak terkecuali tata nilai Adat dan Budaya Melayu. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga melestarikan serta mengimplementasikan tata nilai budaya local yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Eksistensi melayu dalam panggung sejarah ternyata berimplikasi pada pembentukan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Budaya melayu yang memiliki nilai-nilai islam menjadi anutan masyarakat secara luas dan tersebar di seluruh nusantara. Sementara kontribusi yang bersifat ekspresif dapat ditemukan secara faktual, yaitu fungsi bahasa melayu yang menjadi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia sebagaimana yang diproklamasikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi sebagai berikut : (<https://www.zonareferensi.com/teks-sumpah-pemuda/>).

1. Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
2. Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3. Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dari teks diatas kita sadari bahwa untuk mempertahankan nasionalisme kita menggunakan bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia sendiri sesungguhnya adalah bersumber dari Bahasa Melayu ditambah bahasa daerah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1 : Budaya Indonesia

Sumber : (Syafie, 1994, p. 23)

Sebelum kita membahas budaya melayu penulis akan menyampaikan arti kebudayaan menurut (koentjaraningrat, 2009) sebagai berikut:

1. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berate budi atau akal.
2. Dengan begitu kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal.

3. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
4. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu sendiri.

Dari urain tersebut diatas dengan demikian kebudayaan meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Sistem bahasa
2. Sistem seni
3. Sistem moral
4. Sistem keilmuan
5. Sistem mata pencaharian

Jadi bahasa, termasuk bahasa ibu adalah merupakan sumber dari kebudayaan itu sendiri, didalam bahasa kita mengenal kata dengan kata yang halus dan bijak perlahan-lahan kita memasuki peradaban, yang ternyata suku melayu dalam hal ini di Kabupaten Kepulaun Meranti diharapkan mempunyai kontribusi yang handal. Kabupaten Kepulaun Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulaun Meranti merupakan Kabupaten pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulaun Meranti kini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang di pimpin oleh seorang Bupati.

Begitu banyak kultur (budaya) yang ada dalam khasanah Indonesia, maka bagaimana pun satu persatu semuanya harus di angkat termasuk budaya melayu, karena dari budaya melayu yang berasal dari agama islam kita mengenal kata malu, keberanian, tangguh, dan moral. Itu lah sebabnya dalam budaya melayu kita kenal hikayat hulu baling seperti: Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kasturi, Hang Lekiu. Masing-masing hulubalang tersebut mencerminkan kepribadian yang berbeda-beda dan menjadi cikal bakal hikayat dalam masyarakat. oleh karena itu penulis berkeyakinan itu merupakan tugas pemerintah memfasiltasi setiap usaha yang akan mengangkat budaya melayu.

Perkembangan kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan sejenisnya, seperti golongan asli Melayu setempat, Jawa, Tionghoa, Minangkabau, Bugis, Makasar dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaaur dan saling berhubungan sangat baik satu sama lain, sehingga membentuk suatu persatuan sosial maupun budaya itu sendiri. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat selalu membentuk budaya Melayu Islam dengan berbusana melayu (Teluk Belanga bagi kaum pria dan busana muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga di sekolah anak-anak didik dibiasakan mengenal dan mengenakan busana melayu pada hari-hari tertentu.

Tugas dan amanah untuk mempertahankan dan menanamkan budaya melayu mendorong pemerintah harus bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dan Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat melayu agamis islam, kita ketahui bahwa pada era globalisasi saat ini bukan hal yang mudah untuk mempertahankan dan menanamkan budaya pada anak-anak zaman sekarang. Dimana tantangan dan godaan serta pengaruh budaya global hegimoni barat sudah mewabah. Masalah dekedensi moral adalah salah satu akibat yang dikarenakan oleh ketidak siapan masyarakat dalam menghadapi tatangan global. Persoalan tersebut bisa saja bermuara pada pengalaman sistem nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Saat ini sistem nilai tradisional mulai diganti oleh sistem nilai modern sehingga sistem referensi tidak berkiblat pada nilai tradisi, akan tetapi pada nilai-nilai modernitas dengan logika berfikir yang berbeda.

Peran sentral orang tua pada dunia budaya Melayu sangat jelas menjadi entitas budaya yang harus dilaksanakan, mungkin tidak berlebihan jika disebut sebagai ritual wajib yang dilakukan oleh orang tua dalam mempersiapkan anaknya menjelang *akil baligh*. Sehingga siap menghadapi dinamika kehidupan, yang dimana bisa kita lihat sekarang pengaruh budaya barat sangat berkembang cepat. Ritual-ritual tersebut banyak terdapat dalam naskah atau historiografi melayu, seperti dalam kitab *sulalat al Salam* Sultan Manshur Shah dari Malaka disebutkan member nasihat kepada Raja Ahmad, atau istilah lainnya adalah *nobat* dalam tradisi Melayu, sebagai legitimasi perpindahan kekuasaan dari Sultan sebelumnya kepada para pewaris tahta kerajaan. Tradisi ini sesungguhnya tidak hanya terdapat dalam lingkungan istina, akan teteapi ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk transformasi nilai-nilai kehidupan. *Pulang-memulangkan* dalam rentetan acara pernikahan. Budaya Melayu adalah

bentuk nyata sebagai *nobat*, tranfoormasi nilai dalam keluarga tradisional (sunandar, 2015).

Perubahan tata nilai dalam masyarakat dimana kehidupan bukan sekedar melanjutkan “naluri” masa lalu, tetapi telah menjadi arena negosiasi berbagai tata nilai yang tidak hanya lokal dan nasional, akan tetapi global sifatnya. Negosiasi yang terjadi diawali dengan apa yang disebut dengan masyarakat modern atau kebarat-baratan, sehingga tradisi-tradisi barat yang awalnya tidak ditemukan dalam tradisi Timur (terutama dalam kehidupan Melayu) mudah ditemukan dalam perilaku orang Melayu. Seperti, cara berpakaian wanita Melayu sarat dengan nilai estetika, etika dan nilai-nilai islam (baju kurung atau bentuk lainnya dengan catatan tidak mencolok dan menutup aurat) mulai berubah dalam bentuk yang lebih terbuka, modern sesuai pada zaman sekarang ini. Hal ini seperti ini mengarah pada apa yang dianggap sebagai sesuatu yang “norak, kiampungan, ketinggalan zaman”, sehingga harus beralih penampilan yang trendi, modern, dan sesuai dengan zaman. Perubahan seperti terjadi karena kurangnya rasa ketertarikan pada anak-anak zaman sekarang, sehingga mereka lebih tertarik trend-trend pada saat ini (sunandar, 2015).

Kecendrungan ini terjadi sejalan dengan melemahnya peran pusat-pusat kebudayaan sebagai pengendali dan pewaris sistem nilai. Dalam kehidupan Melayu, pusat-pusat kebudayaan tradisional selalu mengedepankan adat-istiadat sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Orang tua-tua Melayu sebenarnya telah melihat munculnya gejala yang dapat menyebabkan

tersisihnya budaya lokal dan terabaikannya nilai-nilai luhur. Hal ini terjadi karena sebagian orang Merlayu sudah semakin jauh dari kebudayaan leluhurnya sehingga mereka dapat dengan mudah menerima kebudayaan asing tanpa tapis dan kemudian menelannya mentah-mentah. Kini budaya melayu berada dipersimpangan jalan. Banyak masalah dan tantangan yang dihadapi sehingga tidak salah jika slogan “*takkan Melayu hilang di bumi*” (afandi, 2018).

Oleh karena itu dari urain latar belakang penelitian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Kebijakan Pemerintah Daerah Mengangkat Budaya Melayu (Suatu Kajian di Kabupaten Kepulaun Meranti Tahun 2016-2017)**.

Perumusan masalah penulis sampaikan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah mengangkat kembali Budaya Melayu di Kabupaten Kepulaun Meranti Tahun 2016-2017 ?
2. Apa kendala yang akan dihadapi dalam mengangkat Budaya Melayu di Kabupaten Kepulaun Meranti Tahun 2016-2017 ?

Tujuan penelitian penulis sampaikan sebagai berikut:

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah mengangkat kembali Budaya Melayu di Kabupaten Kepulaun Meranti Tahun 2016-2017.

2. Untuk mengetahui apa kendala yang akan dihadapi dalam mengangkat Budaya Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan judul penulis.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keberhasilan pemerintah dalam kebijakan pemerintah daerah mengangkat Budaya Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi semua orang yang ingin mengembangkan judul yang diangkat oleh penulis.

E. Literatur Review

No	Judul	Penulis	Tahun	Isi
1.	Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengembangan Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017.	Eka Wahyuni Roma Fitri.	2017	Pengembangan kebudayaan Melayu masih kurang efektif, dimana belum maksimalnya kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata dalam mengadakan Event-Event bertaraf Nasional yang bertujuan untuk mengembangkan Budaya Melayu di Kabupaten Siak di tahun 2025 yang akan mendatang. Jadi hendaknya dilakukan upaya-upaya dalam melakukan kerjasama

				<p>yang intensif antara staltkholder yang bertanggung jawab atas permasalahan kebudayaan, dengan pelaku budaya, lembaga budaya, seniman serta masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia dan begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Siak seharusnya dilibatkan dalam pencapain sinegitas pembangunan kebudayaan Melayu untuk tercapainya rencana utama pada tahun 2025 yang akan mendatang.</p>
--	--	--	--	--

2.	<p>Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelestarian Budaya Daerah Tahun 2015.</p>	<p>Rahmat Purwanto</p>	2018	<p>Dalam meletarikan budaya Melayu sinergitas antara Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya komunikasi yang sungguh-sungguh di dalam internal antara Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dengan Lembaga Kerapatan Adat Luhak khususnya Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah sehingga menghambat upaya pelestarian budaya</p>
----	---	----------------------------	------	--

				daerah. Kemudian kurang efektifnya koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya daerah.
3.	Meknisme Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau.	M. Zainuddin	2018	Mekanisme upaya pelestarian budaya melayu di Tanah Lancang Kuning sehingga menjadi sebuah ikon wisata budaya di Riau sudah dilaksanakan secara maksimal oleh LAM Riau dan unsur-unsur yang bekerja sama dengannya, akan tetapi usaha tersebut mendapat kendala.
4.	Implementasi Budaya	Syahraini	2017	Dalam penelitian ini

	Melayu Dalam Kurikulum Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Riau.	Tambak & Desi Sukenti.		penulis menyimpulkan bahwa implementasi budaya melayu dalam kurikulum pendidikan madrasah ibtidaiyah di Riau sudah terlaksa, dan sudah terakomodir dan di implementasikan dalam kurikulum. Implementasi budaya melayu sudah tersebar di kurikulum inti, ekstrakurikuler, muatan lokal dan eksidentil pada kurikulum pendidikan madrasah ibtidaiyah di provinsi Riau.
5.	Menghulu Berbudaya Melayu, Mengilir Riau Berintegritas: Nilai Anti Korupsi Pada	Amat Budiman.	2018	Budaya melayu dan sistem nilai islam sangat erat kaitannya, oleh karena itu semua

	Mata Diklat Anti Korupsi BPSDM Provinsi Riau.			pandangan hidup orang melayu, tingkah laku dan pola pikir mereka sudah di pengaruhi oleh nilai- nilai islam. Dimana ketika budaya melayu di implementasikan dalam kehidupan masyarakat Riau, sudah kemungkinan besar masyarakat Riau akan menjadi masyarakat yang sangat berintegritas.
6.	Revitalisasi Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji Sebagai Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Etnis Melayu.	Lisken Sirait.	2018.	Terdapat banyak pesan moral dalam setiap bait dari isi Gurindam Dua Belas, seperti nilai religi, pendidikan, kebudayaan, hukum, dan politik. Mengajarkan berbagai nilai dan etika bagaimana

				<p>orang tua berperilaku kepada anaknya begitu juga sebaliknya. Disisi lain juga terdapat pesan moral, nasihat, pedoman hidup seperti bagaimana cara kita beribadah yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana raja atau tuan bisa menghormati masyarakat borjuis, dan bagaimana juga kewajiban kita terhadap sesama manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Gurindam Dua Belas sangat bagus dijadikan sebagai salah satu jenis pembelajaran muatan lokal dalam pendidikan formal. Hal</p>
--	--	--	--	--

				ini diharapkan dapat memberikan rasa kecintaan para generasi muda etnis melayu terhadap nilai-nilai keraifan lokal nenek moyang terdahulu.
7.	Lam Riau Dalam Dinamika Politik Riau (Sebuah Studi Sosiologi).	Muslim Kazima.	2018.	Mengingat peran LAM di tangan-tangan masyarakat Riau, penulis menyimpulkan bahwa peran LAM dibagi menjadi dua yaitu, peran Lam Riau secara Pragmatis dan Subtansial. Peran LAM secara Peagmatis adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LAM Riau dengan memanfaatkan kegiatan

				<p>yang bersifat sosial ataupun politik. Sedangkan LAM secara Subtansial adalah peran LAM yang menggali, membina dan melestarikan budaya melayu melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan LAM itu sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.</p>
8.	Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau.	Puti Bungsu.	2015.	<p>Dalam jurnal ini peran Lembaga Adat Melayu Riau dalam pelestarian budaya daerah di Provinsi Riau berdasarkan indikator-indikator dalam menghadapi perubahan</p>

				dan perkembangan belum tercapai. Hal ini di sebabkan karena lembaga ini belum mampu sepenuhnya melakukan tugas, peran dan fungsinya secara maksimal.
9.	Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantan Singingi.	Adi Tiaraputri.	2017.	Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ad di Provins Riau, di kabupaten Kuantan Singingi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu masih selalu diterapkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10.	Nilai-Nilai Kebajikan: Kebaikan Hati, Loyalitas, dan Kesalehan Dalam Konteks Budaya Melayu.	Dede Fitriana Annatasia, Mirra Noor Milla & Subhan El Hafiz.	2015.	Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan dari peneliti, yaitu dalam situasi umum nilai kebijakan pada budaya melayu tidak berbeda dengan klasifikasi nilai kebijakan oleh Sligman. Kebaikan hati merupakan nilai utama yang merupakan nilai moral yang dianut dalam budaya melayu.
-----	--	---	-------	--

F. Kerangka Teori

a. Kebijakan

1. Pengertian

Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *Policy*, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam Bahasa Inggris dengan *Wisdom*, perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari atasan tertinggi misalnya pemerintah pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada di bawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan secara empiris. Hal ini berlaku bagi pemerintahan sipil, tetapi tidak berlaku bagi pemerintahan militer terutama dalam keadaan darurat perang, karena kalau ternyata di kemudian hari mengalami kekeliruan akan berakibat fatal pada keamanan dan ketertiban, itulah sebabnya pada kekeliruan mengambil keputusan maka dua tingkat ke atas mendapat sasaran hukuman (syafiie, 2013, pp. 355-356)

Thomas R. Dye (1989 : 1) dalam bukunya yang terkenal *Introducing Public Policy* mengatakan bahwa kebijakan negara adalah “*Whatever government choose, to do or not to do*”, artinya kebijakan negara adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali. Jadi kalau melakukan sesuatu menjadi keputusan maka tidak melakukan apa apa sama sekali adalah juga keputusan, karena pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan (karena membawahi polisi, militer, jaksa, dan berbagai pemegang pengamanan dan ketertiban) dapat saja mencegah segala sesuatu seperti kebakaran, pencurian,

perjudian, dan berbagai kriminalitas, dan apa bila hanya diam akan dianggap sengaja melindunginya untuk maksud materialistik.

Hal ini sudah barang tentu tidak berlaku bagi pihak yang tidak memiliki kekuasaan, karena tidak berkuasa mencegah yang akan berakibat kemarahan pelaku kejahatan terhadap pihak yang melarang, untuk itulah rohaniawan yang senantiasa melarang perbuatan tindak kejahatan dapat dalam Agama Islam merebut kekuasaan karena penguasa selayaknya bermoral, dan orang bermoral selayaknya berkuasa. Inilah yang dimaksud dengan *nahi mungkar* sebagai gandingan *amar makruf*, akan halnya *amar makruf* tentu tidak memerlukan kekuasaan karena hanya akan membantu orang lain dalam barang dan jasa (syafiie, 2013, pp. 355-356)

Ketika Walikota Bandung mendiamkan kebakaran Palasari, dan Gubernur Jakarta mendiamkan kebakaran Blok M, akan membuat masyarakat menyangka hal tersebut kesengajaan karena akan membangun gedung yang lebih tinggi. Ketika Bupati Bantul mendiamkan terbunuhnya Wartawan Bernas disangka masyarakat terklibat kasus pembunuhan karena sebelumnya wartawan Udin Syafrudin menulis korupsi kepala daerah setempat. Ketika Bupati Banyuwangi mendiamkan terbunuhnya para dukun santet. maka orang memperkiraan adalah strategi menghabisi Kiyai Nahdlatul Ulama untuk mengurangi kekuatan KH Abdurrahman Wahid kalau nanti memiliki kekuatan melawan orde baru (syafiie, 2013, pp. 355-356)

Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad SAW mendiamkan seorang bekar budak belian Afrika, yaitu menambahkan adzan Subuh dengan kata “Ashalatu

khairun minan naum” (yang artinya *lebih baik sembahyang dari pada tidur*) kalimat yang tidak sebandingkan keindahannya dengan potongan kalimat adzan lainnya itu, disetujui Rasulullah SAW untuk seterusnya sampai kiamat menjadi diperbolehkan, inilah yang disebut dengan preseden. Kendati orang semua tahu bahwa sebagai nabi dan rasul tentu berhak untuk menyatakan boleh atau tidaknya ibadah itu dilakukan, sehingga selanjutnya Hadits adalah apa yang disabdakan Nabi SAW, apa yang diperbuat Nabi, dan apa yang didiamkan Nabi, artinya diperbolehkan atau dilarang karena Nabi melihat dan mendengar (syafiie, 2013, pp. 355-356)

Kebijakan merupakan hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebijakan dapat digunakan sebagai suatu acuan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Oleh karena dalam merumuskan suatu kebijakan, sebaiknya memperhatikan kebutuhan rakyat. Kebijakan dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dalam hal ini kebijakan yang dimaksud mencakup keseluruhan dari lingkup individual hingga lingkup pemerintahan. Pengertian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Untuk mengukur kekuatan isi atau substansi dan pesan kebijakan bisa dilihat melalui (pratiwi, 2017)

1. Besarnya dana yang dialokasi dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasi, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakn.

2. Bentuk kebijakan yang memuat antara lain: kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar.

Kebijakan menurut Charles O. Jones terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Isi kebijakan yang pertama adalah tujuan, dimana tujuan yang dimaksud adalah keinginan yang akan di capai.
2. Plan atau proposal merupakan suatu yang spesifik untuk mencapai tujuan.
3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
4. Keputusan, yaitu tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak, yaitu konsekuensi dari suatu program dalam masyarakat.

2. Model kebijakan

Ada beberapa model pengambilan kebijakan yang dikemukakan oleh Harold Laswell di dalam buku (Syafie, ilmu pemerintahan , 2013, pp. 356-357):

1. Model Elit, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada orang elit tertentu yang dekat dengan penguasa.

2. Model kelompok, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan orang-orang sedang memegang posisi dominan.
3. Model lembaga, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan

Menurut Edwards III (1980) faktor-faktor dari kebijakan adalah yang pertama yaitu *komunikasi*, dimana komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka menyelenggarakan berbagai kegiatan. Kedua yaitu *sumber daya*, dalam hal ini manusia merupakan sumber daya paling penting. Ketiga yaitu *deposisi pelaku*, dimana peranan manusia dalam implementasi kebijakan.

b. Budaya

1. pengertian

Budaya adalah asumsi, nilai, keyakinan, dan norma berperilaku yang menjadi karakteristik seseorang yang bisa membedakan cara berfikir, tindakan sosial, dan bahkan mental (Simarmata, 2018). Budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam pikiran sebagian besar dari

masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Walaupun budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.

Namun, Karena sifatnya yang umum, luas maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari jiwa individu. Selain itu, sejak kecil para individu sudah di terapkan dalam kehidupannya, sehingga konsep-konsep tersebut sudah sangat berakar dalam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak bisa digantikan dengan nilai-nilai budaya lainnya dalam waktu yang sangat singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. Dalam tiap masyarakat baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya satu sama lain yang berkaitan sehingga mejadi suatu sistem. Dimana sistem tersebut sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam budaya yang memberi motivasi kuat terhadap arah kehidupan.

2. Wujud budaya

Menurut (koentjaraningrat, ilmu antropologi, 2009, pp. 150-152) dengan pendapat seorang ahli sosiologi, Talcott Parsons bersama dengan seorang ahli antropologi A.L. Kroeber pernah menyarankan untuk membedakan wujud budaya sebagai suatu sistem dari ide dan konsep menjadi sebagai suatu rangkain tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Sebagaimana tiga wujud tersebut adalah:

1. Wujud budaya sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan.
2. Wujud budaya sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud ideal dari budaya, sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Wujud ini terdapat didalam pemikiran atau perkataan seseorang, dalam alam pikiran warga masyarakat tempat budaya bersangkutan atau hidup. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari budaya ini, yaitu *adat* atau *adat-istiadat* untuk bentuk jamaknya. Wujud kedua dari budaya disebut sebagai sistem sosial atau social system, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain. Wujud ketiga disebut sebagai budaya fisik, yaitu berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya palingkonkret dan berupa benda-benda atau hal yang dapat diraba dan dilihat. Ketiga wujud budaya tersebut didalam kenyataan kehidupan masyarakat tertentu tidak terpisah satu dengan yang lain. Budaya dan adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada manusia. Baik pikiran, ide, maupun tindakan dan karya manusia yang menghasilkan benda budaya.

3. Sistem nilai budaya

Sistem nilai budaya didalam buku (kentjaraningrat, 2009, pp. 153-154) merupakan suatu tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehinggga bisa berfungsi sebagai suatu pedoman yang member arah dan oreintasi pada kehidupan para warga masyarakat.

Menurut seorang ahli antroplogi terkenal C. Kluckhohn, tiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan mengandung lima masalah dasar dalam kehidupan manusia.atas dasar konsep tersebut bersama dengan istrinya F. Kluckhon, merek mengembangkan suatu kerangka yang bisa dipakai oleh para ahli antrapologi untuk menganalisis secara universal tiap variasi dalam sistem nilai budaya yang ada didunia. Kelima massalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya tersebut adalah:

1. Masalah hakikat dari hidup manusia.
2. Masalah hakikat dari karya manusia.
3. Masalah hakikat dari kedudukan mabusia dengan alam sekitarnya.
4. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Suatu sistem nilai budaya sering jugs berupa pandangan hidup atau *world view* bagi manusia yang menganutnya. Namun istilah “pandangan hidup” sebaiknya

dipisahkan dari konsep sistem nilai budaya. Dengan demikian, apabila “sistem nilai” itu merupakan pedoman hidup yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat, maka “pandangan hidup” itu merupakan suatu sistem pedoman yang dianut oleh golongan-golongan atau lebih sempit lagi.

4. Unsur-unsur budaya

Ada tujuh unsur budaya yang dapat ditemukan dibuku (koentjaraningrat, pengantar ilmu antropologi, 2009, pp. 164-165) ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variable yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya dilapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan berdasarkan kerangka teori tersebut diatas penulis menyusun definisi konseptual sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu keputusan yang sudah disetujui dan bukan kegiatan yang bisa diulang atau bukan kegiatan rutin yang bisa diulang-ulang kembali. Suatu agenda pemerintah yang memiliki efek besar terhadap kepentingan masyarakat dan suatu program.

2. Budaya

Budaya adalah suatu tindakan seseorang yang mencerminkan karakteristik yang memiliki nilai dan norma sehingga bisa menciptakan karya-karya baru, dalam hal ini yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variable diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka dari konsep tersebut diatas penulis menyusun operasionalisasi sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu keputusan yang menjadi pedoman dan dasar rencana suatu keputusan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tanggungjawab yang sudah diberikan. Kebijakan dapat diambil keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh perolehan keputusan dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Ada beberapa indikator di dalam kebijakan yang dikemukakan oleh (syafiie, ilmu pemerintahan , 2013) yaitu:

a) Variabel kebijakan

1. Tahap kebijakan

a. Permasalahan

b. Tujuan kebijakan

c. Manfaat kebijakan

d. Progam dan tindakan

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan

1. Komunikasi

2. Sikap pelaksana

2. Budaya

Budaya adalah asumsi, nilai, keyakinan, dan norma berperilaku yang menjadi suatu karakteristik seseorang yang bisa membedakan cara berpikir seseorang, tindakan sosial dan bahkan mental. Budaya itu bersifat sangat umum dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga menghasilkan karya, cipta dan rasa manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan klaim masyarakat dengan cara belajar. Budaya merupakan tingkat paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat.

Ada beberapa indikator di dalam budaya yang dikemukakan oleh (keontjaraningrat, 2009) diantaranya sebagai berikut :

- a) Wujud budaya
- b) Sistem nilai budaya
- c) Unsur-unsur budaya

Tabel 1.2

Informan

No	Jenis Informan	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan & Budaya	5
2.	Dinas Pariwisata	5
3.	Tokoh Adat	5
4.	Masyarakat	5
	Jumlah	20

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagaimana dinyatakan oleh (arikunto, 2013) data kualitatif adalah data yang diwujudkan dalam kata keadaan atau sifat. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti,

dan benda-benda yang diamati secara detail yang bertujuan untuk mengetahui atau mendiskripsikan dan menganalisis kondisi yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif ini dimaksud untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah mengangkat budaya melayu (suatu kajian dikabupaten meranti tahun 2016-2017).

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (muhadjir, 1996).

b. Sumber Data

Sumber data yaitu dari mana data bisa diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari:

1. Data primer, yaitu data yang di peroleh oleh peneliti langsung dari pihak pertama berupa pendapat subyektif karena sifatnya pribadi, data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh oleh peneliti dari pihak ketiga yang sifatnya cenderung lebih objektif karena sudah di olah, di kumpulkan dari data statistik, jurnal, hasil penelitian orang lain dan atau manografi setempat.

Kemudian data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, notulen rapat), foto-foto, film rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkuat data primer.

3. Unit Analisis

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti, yang bisa berupa benda, individu, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan informan adalah masyarakat yang meliputi Pemerintah Daerah, Partai, Guru, nelayan, pedagang. Tokoh Adat, ibu rumah tangga.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Informan yang akan di wawancarai adalah Dinas Pendidikan & Budaya, Dinas Pariwisata, Tokoh Adat, Guru, masyarakat.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sistematis dan standar. Metode observasi digunakan penulis untuk mencatat yang terjadi pada saat penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara melengkapi data dari bidang keilmuan yang meliputi buku, majalah, surat kabar, rapat, artikel, jurnal dan data-data cetak yang memiliki korelasi dengan tema kajian yang akan dibahas (arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, 2013). Mengacu pada pengertian tersebut, maka dalam penelitian penulis akan mencari data yang ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah mengangkat budaya melayu.